

TESIS

**KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM PENENTUAN
HARGA DAN LOKASI PASAR TRADISIONAL SANGGENG
TERHADAP BISNIS DAGANG DI KABUPATEN
MANOKWARI**



JURINUS NUHAM

NO. Mhs : 165202585/PS/MIH

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2018**

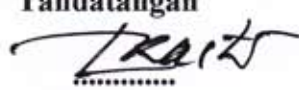




**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

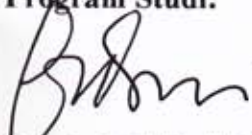
PENGESAHAN UJIAN TESIS

Nama : JURINUS NURHAM
NomorMahasiswa : 165202585/PS/MIH
Konsentrasi : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM
PENENTUAN HARGA DAN LOKASI PASAR
TRADISONAL SANGGENG TERHADAP BISNIS
DAGANG DI KABUPATEN MANOKWARI**

Telah Diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal

Dewan Penguji	Nama	Tandatangan
1. Ketua	Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.	
2. Sekretaris	Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.	
3. Anggota	Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum.	

Ketua Program Studi:


Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JURINUS NURHAM

No. Mahasiswa : 165202585/PS/MIH

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis saya yang berjudul:

**KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM PENENTUAN HARGA DAN
LOKASI PASAR TRADISONAL SANGGENG TERHADAP BISNIS
DAGANG DI KABUPATEN MANOKWARI**

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terdapat plagiasi dalam tesis saya tersebut diatas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 13 Januari 2018

Yang menyatakan,



Jurinus Nurham

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penelitian tesis ini dapat diselesaikan dengan berjudul **KEBIJAKAN HUKUM DAERAH DALAM PENENTUAN HARGA DAN LOKASI PASAR TRADISONAL SANGGENG TERHADAP BISNIS DAGANG DI KABUPATEN MANOKWARI** pada Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan ilmu, arahan, dan bimbingannya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Ucapan terimakasih ini juga disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Gregorius Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Bapak Fransiscus Xaverius Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Ibu Dr. Elisabeth Sundari, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang selalu membimbing, memberikan petunjuk dan motivasi dalam penyelesaian tesis ini;

5. Bapak Dr. ST. Mahendra Soni Indriyo, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah membimbing dan memberikan masukan dalam penyelesaian tesis ini dengan baik;
6. Bapak Drs Daniel Mandacan, M.Si. selaku Sekertaris Daerah Kabupaten Manokwari, yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.
7. Bapak Yosias Saroi, S.H., M.H. selaku Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak yang memberikan dukungan berupa dana akhirnya bisa terbayar tunggakan di Universitas Atmajaya Yogyakarta;
8. Bapak Herman Nuham, S.Sos. selaku ayah yang membiayai studi, dan banyak membantu memberikan dana terkait Pembayaran Tunggakan maupun penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.
9. Bapak Dr. Yehuda Mandacan, S.Th., M.Th. selaku Dosen pengajar Sekolah Tinggi Erikson Trit yang mana mendorong melalui dana dan motivasi dalam kata-kata yang baik sehingga dapat saya melanjutkan Studi di Universitas Atmajaya Yogyakarta;
10. Bapak, Ibu Jemaat Agurazo dan Jemaat Eklesia Waluri yang telah mendoakan agar dapat menjalani perkuliahan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, sehingga perkuliahan dapat berjalan dengan baik;
11. Bapak Yulianus Ahoren, S.Pdk. selaku kakak yang telah banyak membantu memberikan informasi terkait penulisan tesis, sehingga dapat berjalan dengan baik.

12. Yang Terhormat seluruh Dosen pengajar serta staff pengelola dan administrasi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta;
13. Untuk seluruh keluarga besar, terkhusus untuk Mama Ester Ahoren, Ibu Rosalina Senggi, Ibu Redina Nuham,S,Pdk , Melki Nelson Nuham, Om Titus Ahoren, S.Sos, Kakak Yulianus Ahoren, S.Pdk. dan untuk semua doa dan dukungannya;
14. Sahabat-sahabat yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penulisan, terkhusus Angkatan Agustus 2016 MIH UAJY, HIMMAKUM MIH-UAJY, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, semoga kekurangan yang ada bisa menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya. Tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan untuk menambah pengetahuan serta dapat membawa hikmah kepada pembaca.

Yogyakarta, 23 Januari 2018



Jurinus Nurham

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum.....	8
1. Pengertian Kebijakan Hukum.....	8
2. Pembuat Kebijakan Hukum.....	11
3. Wujud Kebijakan Hukum	15
B. Peran Negara Dalam Kegiatan Perekonomian	21
1. Dasar Konstitusional.....	21
2. Tujuan Negara Dibidang Perekonomian.....	25

3. Pembagian Kewenangan Terhadap Pemerintah Daerah.....	29
C. Konsep dan Landasan Teori.....	38
D. Batasan Konsep.....	50
BAB III CARA PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Sumber Data.....	53
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Metode Analisis Data.....	54
F. Proses Berpikir.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Gambaran Umum Tentang Pasar Tradisional Sanggeng Terhadap Peran Pemerintah Daerah	57
B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penentuan Harga Pasar Tradisional Sanggeng Di Kabupaten Manokwari	59
C. Peran Pemerintah Daerah Dalam Penentuan Lokasi Pasar Tradisional Sanggeng Di Kabupaten Manokwari	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Kebijakan Hukum Daerah Dalam Penentuan Harga Dan Lokasi Pasar Tradisional Sanggeng Terhadap Bisnis Dagang Di Kabupaten Manokwari”. Tesis dengan judul tersebut bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penentuan harga pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari dan untuk mengetahui dan mengkaji peran Pemerintah Daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Sumber data berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dan wawancara narasumber. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum. Proses berpikir deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan. Teori keadilan dan konsep campur tangan pemerintah digunakan sebagai analisis dalam mengkaji hasil penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam penentuan harga pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah kebijakan berupa peraturan pemerintah daerah mengenai penetapan harga dengan cara adanya operasi pasar terhadap harga-harga kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya seperti sandang karena masyarakat asli papua menjual barang dagangnya berupa hasil panen dengan harga murah akan tetapi masyarakat asli papua juga perlu memenuhi kebutuhan lainnya seperti pakaian atau alat-alat kebutuhan rumah tangga sebagaimana kebutuhan tersebut dijual dengan harga yang mahal sehingga perlunya campur tangan pemerintah untuk mengatasi kendala tersebut agar dapat terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah dalam penentuan lokasi pasar tradisional sanggeng di Kabupaten Manokwari adalah sebuah peraturan atau kebijakan mengenai penetapan zonasi terhadap pembagian wilayah area pasar yang khusus penjual kebutuhan pokok (pangan), khusus penjual pakaian (sandang), atau kebutuhan lainnya agar dapat menyeimbangkan fungsi pasar, tarif yang dikenakan harus lebih rendah karena pedagang mama mama papua berdagang hasil panennya sendiri sehingga dijual dengan harga murah, meningkatkan sarana dan prasarana seperti tempat parkir, dan pengawasan langsung dari pemerintah daerah (operasi pasar).

Kata Kunci: Harga, Lokasi, Pasar Tradisional, Kabupaten Manokwari.

ABSTRACT

This thesis entitled "Local Legal Policy In Determining Price And Location Of Traditional Market Of Sanggeng To Trade Business In Manokwari District". Thesis with the title aims to know and examine the role of local government in determining the market price of traditional sanggeng in Manokwari District and to know and examine the role of Local Government in determining the location of traditional market sanggeng in Manokwari District. This research is a normative research with statute approach. The data sources are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Methods of data collection using library research and interviews of resource persons. Primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials were analyzed using legal analysis methods. The deductive thinking process is used to draw conclusions. The theory of justice and the concept of government interference is used as an analysis in reviewing the results of research. The results of research and discussion show that the role of local government in determining the market price of sanggeng traditional in Manokwari Regency is a policy in the form of local government regulation concerning price fixing by way of market operation to the price of basic necessities and other necessities such as clothing since indigenous people selling goods trade in the form of crops with cheap prices but the indigenous papua also need to meet other needs such as clothing or household utensils as the need is sold at a price that is expensive so that the need for government intervention to overcome these obstacles in order to realize the justice and welfare of society. The role of local government in determining the location of traditional sanggeng market in Manokwari regency is a regulation or policy on zoning determination on the division of market area that is special to seller of basic needs (food), special seller of clothing (clothing), or other need in order to balance market function, the tariff should be lower because the mama mama mama papua trades its own crops so that it sells cheaply, improves facilities and infrastructure such as parking lots, and direct supervision from local government (market operations).

Keywords: Price, Location, Traditional Market, Manokwari District